



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun..../3

20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 102);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2022.

Pasal 1

Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 35) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Desember 2022  
7 Jumadil Awal 1444

*h.pj.* GUBERNUR ACEH, *A*  


**ACHMAD MARZUKI**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Desember 2022  
7 Jumadil Awal 1444

*R* SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h.*

  
**BUSTAMI**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR  
 ACEH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN  
 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
 TAHUN 2022.-----

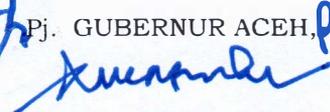
**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT ACEH TAHUN 2022**

No.	NOMOR	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
1	01/P-Renja-Disdik/2022	Dinas Pendidikan Aceh	
2	02/P-Renja-Dinkes/2022	Dinas Kesehatan Aceh	
3	03/P-Renja-RSUZA/2022	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin	
4	04/P-Renja-RSJ/2022	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
5	05/P-Renja-RSIA/2022	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	
6	06/P-Renja/PUPR/2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
7	07/P-Renja-Pengairan/2022	Dinas Pengairan Aceh	
8	08/P-Renja-Perkim/2022	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
9	09/P-Renja-Satpol.PP.WH/2022	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
10	10/P-Renja-BPBA/2022	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
11	11/P-Renja-Dinsos/2022	Dinas Sosial Aceh	
12	12/P-Renja-Naker/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
13	13/P-Renja-DP3A/2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
14	14/P-Renja-Pangan/2022	Dinas Pangan Aceh	
15	15/P-Renja-Tanah/2022	Dinas Pertanahan Aceh	
16	16/P-Renja-DRKA/2022	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
17	17/P-Renja-DPMGA/2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
18	18/P-Renja-Dishub/2022	Dinas Perhubungan Aceh	
19	19/P-Renja-Kominsa/2022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
20	20/P-Renja-Kop.UKM/2022	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
21	21/P-Renja-DPMP2TA/2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh	
22	22/P-Renja-Dispora/2022	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	
23	23/P-Renja-Disbudpar/2022	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
24	24/P-Renja-Arpus/2022	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh	
25	25/P-Renja-DPDA/2022	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
26	26/P-Renja-MPA/2022	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
27	27/P-Renja-KKW/2022	Keurukon Katibul Wali Aceh	
28	28/P-Renja-MAA/2022	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
29	29/P-Renja-Dinsyar/2022	Dinas Syariat Islam Aceh	

4

No.	NOMOR	SKPA	Keterangan
30	30/P-Renja-MPU/2022	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	
31	31/P-Renja-BMA/2022	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
32	32/P-Renja-BRA/2022	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
33	33/P-Renja-DKP/2022	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
34	34/P-Renja-Tanbun/2022	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
35	35/P-Renja-Disnak/2022	Dinas Peternakan Aceh	
36	36/P-Renja-DLHK/2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
37	37/P-Renja-ESDM/2022	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
38	38/P-Renja-Indag/2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
39	39/P-Renja-Inspektorat/2022	Inspektorat Aceh	
40	40/P-Renja-BAPPEDA/2022	Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh	
41	41/P-Renja-BPKA/2022	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
42	42/P-Renja-BKA/2022	Badan Kepegawaian Aceh	
43	43/P-Renja-BPSDM/2022	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
44	44/P-Renja-BPPA/2022	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
45	45/P-Renja-Ro.Umum/2022	Biro Umum Setda Aceh	
46	46/P-Renja-Ro.Pemotda/2022	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh	
47	47/P-Renja-Romi/2022	Biro Perekonomian Setda Aceh	
48	48/P-Renja-Ro.isra/2022	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh	
49	49/P-Renja-Ro. Organ/2022	Biro Organisasi Setda Aceh	
50	50/P-Renja-Ro.Hukum/2022	Biro Hukum Setda Aceh	
51	51/P-Renja-Ro. Adpem/2022	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh	
52	52/P-Renja-Ro. Adpim/2022	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	
53	53/P-Renja-Ro.PBJ/2022	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Aceh	
54	54/P-Renja-Sek.DPRA/2022	Sekretariat DPR Aceh	
55	55/P-Renja-Kesbangpol/2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

22

Pj. GUBERNUR ACEH,  


**ACHMAD MARZUKI**